



Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN Peserta PBPB Sektor Informal di Kelurahan Tlogosari Kulon

Factors Associated with JKN Payment Compliance among Informal PBPB in Tlogosari Kulon Village

Azzahra Nur Azizah^{1*}, Chatila Maharani²

^{1,2}Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

Compliance in paying JKN (National Health Insurance) contributions is crucial for ensuring the sustainability of the program. In Semarang City, the number of non-compliant PBPB (Non-Wage Worker) participants continues to rise, from 35.99% in 2022 to 48.36% or 108,949 peoples in 2023, and increased to 109,345 peoples in 2024, with total arrears reaching IDR 107,206,921,401 in 2024. This study aimed to identify the factors associated with compliance in paying JKN contributions among PBPB participants in the informal sector in Tlogosari Kulon Village, Semarang City. The research used a quantitative analytical observational design with a cross-sectional approach. A total of 183 respondents were selected through purposive sampling. The study was conducted in February-March 2025. Data analysis included univariate, bivariate (chi-square test), and multivariate (multiple logistic regression analysis). The results showed that the factors associated with compliance in paying JKN contributions are the level of education, family income per member, number of family members covered by BPJS Kesehatan, payment method, perception of risk, perception of benefits of BPJS Kesehatan, history of catastrophic illness, knowledge about JKN, and understanding of compliance and penalties related to JKN services. This research is expected to help stakeholders develop strategies such as enhancing education quality and frequency, and empowering JKN cadres or community leaders as reminders to improve contribution compliance among PBPB participants.

ABSTRAK

Kepatuhan membayar iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) menjadi salah satu hal yang krusial dalam menjaga keberlangsungan program JKN. Peserta PBPB (Pekerja Bukan Penerima Upah) di Kota Semarang yang tidak patuh atau menunggak membayar iuran bulanan mengalami peningkatan, yakni dari 35,99% tahun 2022 menjadi 48,36% atau 108.949 jiwa tahun 2023 dan meningkat menjadi 109.345 jiwa tahun 2024, dengan jumlah tunggakan mencapai Rp107.206.921.401 pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPB pada sektor informal di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang. Penelitian ini berjenis kuantitatif observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diambil berjumlah 183 orang, melalui teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2025. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat dengan uji korelasi chi-square, serta multivariat (analisis regresi logistik berganda). Hasil temuan studi ini didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga per anggota keluarga, jumlah anggota keluarga yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan, metode pembayaran, persepsi terhadap risiko, persepsi manfaat BPJS Kesehatan, riwayat penyakit katastrofik, pengetahuan terhadap JKN, serta pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN. Penelitian ini diharapkan dapat membantu stakeholders dalam menyusun strategi berupa peningkatan mutu dan frekuensi edukasi serta pemberdayaan kader JKN atau tokoh masyarakat sebagai pengingat iuran untuk meningkatkan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPB.

Keywords : Compliance, contribution payment, JKN, PBPB participants

Kata Kunci : JKN, kepatuhan, membayar iuran, peserta PBPB

Corresponding author : Azzahra Nur Azizah
Email : azzahranurazizah223@students.unnes.ac.id

• Received 7 Mei 2025 • Accepted 26 Juni 2025 • Published 31 Juli 2025

• p - ISSN : 2088-7612 • e - ISSN : 2548-8538 • DOI: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol11.Iss2.2239>

Copyright ©2017. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial used, distribution and reproduction in any medium

PENDAHULUAN

Universal Health Coverage (UHC) adalah sebuah program yang disepakati oleh *World Health Organization* (WHO) untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang adil dan menyeluruh bagi seluruh penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif dalam upaya pencapaian UHC, yang diwujudkan melalui implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mengelola dan menyelenggarakan program JKN, pemerintah mendirikan lembaga berbadan Hukum Publik yang diberi nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan [1]. BPJS Kesehatan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Hingga Desember 2024, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 278.096.343 jiwa yang setara dengan 98,76%. Pada Desember 2024, Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 35.762.456 jiwa dengan cakupan 94,38%. Provinsi Jawa Tengah merupakan urutan ke-3 dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan tertinggi di Indonesia [2].

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah memiliki populasi yang cukup padat. Pada tahun 2024, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kota Semarang mencapai 1.695.411 jiwa. Pada Desember 2024, kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang untuk PBPU mencapai 278.127 jiwa [3]. Diketahui peserta PBPU di Kota Semarang yang tidak patuh membayar iuran mengalami peningkatan, yakni dari 35,99% tahun 2022 menjadi 48,36% atau 108.949 jiwa tahun 2023 dan meningkat menjadi 109.345 jiwa tahun 2024, dengan jumlah tunggakan tercatat sebesar Rp107.206.921.401 pada tahun 2024 [3,4]. Kelurahan Tlogosari Kulon tercatat memiliki jumlah peserta PBPU sektor informal terbanyak di Kota Semarang dan Kecamatan Pedurungan yaitu 6.577 jiwa pada tahun 2023. Kelurahan tersebut juga tercatat menjadi salah satu wilayah penyumbang tunggakan iuran, dengan jumlah peserta yang tidak patuh mencapai 2.650 jiwa [5]. Dampak yang ditimbulkan dari ketidakpatuhan

membayar iuran JKN, yakni dapat menyebabkan defisit bagi pengelola BPJS Kesehatan, sedangkan bagi peserta status kepesertaan menjadi tidak aktif, serta penjaminan pelayanan kesehatan juga diberhentikan [6]. Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayar rutin setiap bulan oleh peserta PBPU sesuai kelas perawatan yang dipilih. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ialah individu yang bekerja/menjalankan usahanya secara mandiri dengan menanggung sendiri risiko pekerjaan tersebut [7].

Faktor yang diduga memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU pada sektor informal, yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami manfaat BPJS Kesehatan [8]. Ketidakstabilan pendapatan dan sifat pekerjaan sektor informal yang tidak menentu juga menyulitkan peserta dalam mengalokasikan dana serta membayar iuran secara rutin [9]. Banyaknya anggota keluarga yang ditanggung dapat menurunkan kepatuhan membayar iuran [10]. Besaran iuran yang disesuaikan dengan kelas kepesertaan yang dipilih juga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar iuran. Semakin tinggi kelas kepesertaan, semakin banyak jumlah iuran yang harus dibayar [7]. Peserta yang membayar secara tunai cenderung kurang patuh dibandingkan metode non-tunai akibat kendala waktu [6]. Selain itu, semakin mudah akses tempat pembayaran, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan peserta dalam membayar iuran [11]. Pemahaman yang baik tentang risiko kesehatan mendorong kepatuhan membayar iuran [12], sedangkan persepsi negatif terhadap manfaat BPJS Kesehatan berpotensi menurunkan kepatuhan [13]. Riwayat penyakit katastropik juga berpengaruh, di mana peserta yang jarang sakit lebih rentan menunggak [12]. Kurangnya pengetahuan dapat berkontribusi meningkatkan risiko ketidakpatuhan dalam membayar iuran [14]. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, studi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN oleh PBPU yang tergolong dalam sektor informal di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang.

METODE

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini berjenis kuantitatif observasional analitik dengan desain *cross sectional*.

Tempat dan Periode Pelaksanaan

Riset dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2025 di Kelurahan Tlogosari Kulon, Kota Semarang.

Populasi dan Sampel

Kelompok sasaran dalam studi ini ialah individu PBPU sektor informal yang menjadi peserta utama atau penanggung dalam membayar iuran, yang jumlahnya tidak teridentifikasi. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Lemeshow sehingga diperoleh sebanyak 183 responden.

Teknik dan Kriteria Pemilihan Sampel

Proses pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pemilihan sampel didasarkan pada ketentuan kriteria inklusi yaitu kepala keluarga atau penanggung yang bertanggungjawab atas pembayaran iuran JKN setiap bulannya dan bersedia menjadi responden, sedangkan kriteria eksklusi yaitu sedang sakit atau memiliki keterbatasan komunikasi yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data primer serta data sekunder. Data primer didapat dengan wawancara menggunakan instrumen kuesioner, sementara data sekunder didapat dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang meliputi jumlah peserta PBPU yang patuh dan tidak patuh dalam membayar iuran JKN. Analisis data yang digunakan meliputi analisis univariat, bivariat, serta multivariat. Univariat dilakukan guna melihat distribusi frekuensi serta persebaran data. Sedangkan bivariat guna mengetahui korelasi antar variabel bebas dan variabel terikat, melalui uji *chi-square*. Multivariat dilakukan guna mengetahui variabel bebas apa yang paling berhubungan terhadap variabel terikat melalui regresi logistik ganda dengan metode

Backward LR. Variabel yang digunakan pada analisis multivariat ialah variabel yang menunjukkan nilai *pvalue* < 0,25 saat analisis bivariat.

Variabel Independen dan Variabel Dependen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga per anggota, pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan dalam BPJS Kesehatan, kelas kepesertaan, metode pembayaran, akses pembayaran, persepsi terhadap risiko, persepsi manfaat BPJS Kesehatan, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan terhadap JKN, pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan, serta pengetahuan terhadap defisit BPJS Kesehatan. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU sektor informal. Pada penelitian ini, faktor kepatuhan membayar iuran JKN dikelompokkan ke dalam 2 klasifikasi, yaitu patuh dan tidak patuh. Responden dikategorikan patuh jika tidak pernah terlambat membayar iuran selama 1 tahun terakhir (paling lambat pada hari ke-10 tiap bulan), sedangkan responden dikategorikan tidak patuh jika selama 1 tahun terakhir pernah terlambat bayar iuran (melebihi hari ke-10 tiap bulan).

Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang memuat pertanyaan mengenai identitas responden dan variabel faktor-faktor kepatuhan.

Etik Penelitian

Studi ini telah memperoleh izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dengan nomor 786/KEPK/FK/KLE/2025.

HASIL

Analisis Univariat

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden tidak patuh membayarkan iuran JKN. Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan tinggi, pendapatan

keluarga rendah, bekerja di sektor jasa dan layanan umum, jumlah anggota keluarga kecil, kelas peserta kelas 3, metode tunai, akses mudah, memiliki persepsi kurang baik terhadap risiko, persepsi baik terhadap manfaat BPJS Kesehatan,

tidak memiliki riwayat penyakit katastrofik, memiliki pengetahuan baik terhadap JKN, memiliki pengetahuan kurang baik mengenai kepatuhan dan denda JKN, serta tentang defisit BPJS Kesehatan.

Tabel 1. Analisis Univariat

Variabel	n = 183	(%)
Kepatuhan Membayar Iuran JKN		
Patuh	90	49,2
Tidak Patuh	93	50,8
Tingkat Pendidikan		
Tinggi	116	63,4
Rendah	67	36,6
Tingkat Pendapatan Keluarga Per Anggota Keluarga		
Tinggi	50	27,3
Sedang	49	26,8
Rendah	84	45,9
Pekerjaan		
Sektor Jasa dan Layanan Umum	171	93,4
Sektor Pangan	12	6,6
Jumlah Anggota Keluarga yang Ditanggung dalam BPJS Kesehatan		
Kecil	142	77,6
Besar	41	22,4
Kelas Kepesertaan		
Kelas 1	19	10,4
Kelas 2	38	20,8
Kelas 3	126	68,9
Metode Pembayaran		
Tunai	122	66,7
Non Tunai	61	33,3
Akses Pembayaran		
Mudah	160	87,4
Sulit	23	12,6
Persepsi terhadap Risiko		
Baik	57	31,1
Kurang Baik	126	68,9
Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan		
Baik	123	67,2
Kurang Baik	60	32,8
Riwayat Penyakit Katastropik		
Ada	33	18,0
Tidak Ada	150	82,0
Pengetahuan terhadap JKN		
Baik	128	69,9
Kurang Baik	55	30,1
Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran dan Denda Pelayanan Program JKN		
Baik	73	39,9
Kurang Baik	110	60,1
Pengetahuan terhadap Defisit BPJS Kesehatan		
Baik	44	24,0
Kurang Baik	139	76,0

Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan uji *chi-square*. Jika nilai *p-value* $\leq 0,05$ maka variabel berhubungan. Berdasarkan Tabel 2, faktor yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN ialah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga per anggota keluarga,

jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan pada BPJS Kesehatan, metode pembayaran, persepsi terhadap risiko, persepsi manfaat BPJS Kesehatan, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan terhadap JKN, serta pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN.

Tabel 2. Analisis Bivariat

Variabel	Kepatuhan Membayar Iuran JKN				<i>p-value</i>
	Patuh		Tidak Patuh		
	n	%	n	%	
Tingkat Pendidikan					
Tinggi	64	71,1	52	55,9	0,048 ^{*a}
Rendah	26	28,9	41	44,1	
Tingkat Pendapatan Keluarga Per Anggota Keluarga					
Tinggi	41	45,6	9	9,7	0,000 ^{*a}
Sedang	27	30,0	22	23,7	0,002 ^{*a}
Rendah (<i>ref</i>)	22	24,4	62	66,7	
Pekerjaan					
Sektor Jasa dan Layanan Umum	85	94,4	86	92,5	0,810
Sektor Pangan	5	5,6	7	7,5	
Jumlah Anggota Keluarga yang Ditanggung dalam BPJS Kesehatan					
Kecil	76	84,4	66	71,0	0,045 ^{*a}
Besar	14	15,6	27	29,0	
Kelas Kepesertaan					
Kelas I	11	12,2	8	8,6	0,472
Kelas II	21	23,3	17	18,3	0,416
Kelas III (<i>ref</i>)	58	64,4	68	73,1	
Metode Pembayaran					
Tunai	69	76,7	53	57,0	0,008 ^{*a}
Non Tunai	21	23,3	40	43,0	
Akses Pembayaran					
Mudah	81	90,0	79	84,9	0,419
Sulit	9	10,0	14	15,1	
Persepsi terhadap Risiko					
Baik	36	40,0	21	22,6	0,017 ^{*a}
Kurang Baik	54	60,0	72	77,4	
Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan					
Baik	68	75,6	55	59,1	0,027 ^{*a}
Kurang Baik	22	24,4	38	40,9	
Riwayat Penyakit Katastropik					
Ada	22	24,4	11	11,8	0,043 ^{*a}
Tidak Ada	68	75,6	82	88,2	
Pengetahuan terhadap JKN					
Baik	70	77,8	58	62,4	0,035 ^{*a}
Kurang Baik	20	22,2	35	37,6	
Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran dan Denda Pelayanan Program JKN					
Baik	55	61,1	18	19,4	0,000 ^{*a}
Kurang Baik	35	38,9	75	80,6	
Pengetahuan terhadap Defisit BPJS Kesehatan					
Baik	21	23,3	23	24,7	0,962
Kurang Baik	69	76,7	70	75,3	

^{*}) nilai *p-value* <0,05 berhubungan pada uji bivariat

^a) nilai *p-value* <0,25 untuk masuk dalam uji multivariat

Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan dengan regresi logistik berganda karena variabel dependen bersifat dikotom. Proses analisis ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai tahap akhir, maka dapat ditarik simpulan bahwasanya variabel yang

paling berhubungan ialah variabel pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN dengan nilai *p-value* 0,000 dan nilai OR tertinggi 18,193. Hasil tahap akhir dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Analisis Multivariat

Variabel	B	Wald	<i>p-value</i>	Exp(B)	95% CI	
					Lower	Upper
Tingkat Pendapatan Keluarga Per Anggota Keluarga						
Tinggi	1,989	15,573	0,000	7,312	2,722	19,639
Sedang	0,979	4,726	0,030	2,661	1,101	6,431
Rendah		16,028	0,000			
Jumlah Anggota Keluarga yang Ditanggung dalam BPJS Kesehatan	1,111	5,098	0,024	3,038	1,158	7,972
Metode Pembayaran	1,097	6,237	0,013	2,995	1,266	7,084
Pengetahuan terhadap JKN	2,193	11,623	0,001	8,958	2,540	31,596
Pengetahuan terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran dan Denda Pelayanan Program JKN	2,901	23,284	0,000	18,193	5,599	59,107
Constant	-5,111	28,869	0,000	0,006		

PEMBAHASAN

Hubungan Tingkat Pendidikan

Hasil studi diperoleh ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU (*p-value*=0,048). Selaras dengan temuan ini bahwa pendidikan berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran. Pendidikan dapat meningkatkan literasi kesehatan, kemampuan mengambil keputusan terkait pembiayaan kesehatan, membentuk sikap kritis, dan kesadaran jangka panjang terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan secara rutin [8]. Temuan ini tidak selaras dengan temuan lain bahwa pendidikan bukan merupakan faktor penentu kepatuhan membayar iuran JKN. Hal tersebut dikarenakan peranan faktor pendidikan terhadap kepatuhan masih kalah kuat dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk membayar iuran JKN secara rutin [10].

Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara tingkat pendapatan keluarga per anggota keluarga

dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU (*p*<0,05). Sejalan dengan temuan ini bahwa pendapatan berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan. Besarnya pendapatan memiliki peran signifikan dalam mendorong kesadaran berasuransi kesehatan. Semakin tinggi pendapatan, makin besar kecenderungan seseorang untuk memahami pentingnya perlindungan kesehatan dan rutin membayar iuran [12]. Temuan ini tidak selaras dengan temuan lain bahwa tidak ada korelasi antara pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran. Perspektif seseorang dalam memaknai pentingnya kesehatan serta kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan yang relevan dengan apa yang dibutuhkan menjadi pertimbangan untuk patuh membayar iuran [15].

Hubungan Pekerjaan

Hasil studi diperoleh tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU (*p-value*=0,810). Searah dengan temuan ini bahwa pekerjaan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN [14]. Namun, penelitian lain

menemukan pekerjaan berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran [9]. Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai pekerjaan berpotensi mempunyai kemampuan finansial untuk membayar iuran JKN. Namun, tidak menutup kemungkinan faktor lain seperti prioritas pengeluaran juga turut mempengaruhi keputusan seseorang untuk patuh atau tidak dalam membayar iuran.

Hubungan Jumlah Anggota Keluarga

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara jumlah anggota keluarga yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,045$). Senada dengan temuan ini bahwa jumlah individu dalam keluarga berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran. Banyaknya individu dalam keluarga mempengaruhi cara pandang kepala keluarga terhadap risiko kesehatan dan potensi kerugian ekonomi akibat penyakit [12]. Semakin banyak anggota keluarga, semakin tinggi risiko masalah kesehatan dan biaya pengobatan, sehingga mendorong kepala keluarga untuk mengantisipasi dengan mengalokasikan dana perlindungan kesehatan melalui program asuransi [16].

Hubungan Kelas Kepesertaan

Hasil studi diperoleh tidak terdapat hubungan antara kelas kepesertaan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p\text{-value}>0,05$). Sejalan dengan temuan ini bahwa kelas perawatan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar premi JKN [17]. Dalam beberapa kasus, terdapat peserta JKN yang baru mengikutsertakan anggota keluarganya ketika sedang mengalami kondisi sakit, namun setelah kondisi membaik, cenderung mengabaikan pembayaran iuran secara rutin [11]. Namun, penelitian lain menemukan bahwa kelas kepesertaan berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN [18]. Pemilihan kelas BPJS Kesehatan biasanya disesuaikan dengan kondisi ekonomi peserta, di mana peserta dengan kemampuan finansial lebih baik cenderung memilih kelas lebih tinggi dan lebih rutin

membayar iuran karena persepsi layanan yang lebih nyaman.

Hubungan Metode Pembayaran

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara metode pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p\text{-value}=0,008$). Sejalan dengan temuan ini bahwa metode pembayaran mempunyai korelasi dengan kepatuhan membayar iuran [19]. Temuan ini menyatakan bahwasanya metode pembayaran berperan penting dalam menentukan kepatuhan peserta membayar iuran. Metode pembayaran tunai memberikan fleksibilitas bagi peserta PBPU sektor informal yang memiliki pendapatan tidak tetap, karena dapat menyesuaikan waktu pembayaran sesuai kondisi keuangan. Sebaliknya, metode non tunai seperti *autodebet* atau *transfer* dinilai kurang fleksibel dan dapat membebani peserta jika saldo rekening tidak mencukupi, meskipun secara administrasi lebih praktis dan efisien [20].

Hubungan Akses Pembayaran

Hasil studi diperoleh tidak ada hubungan antara akses pembayaran dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p\text{-value}=0,419$). Sejalan dengan temuan ini bahwa jarak menuju lokasi pembayaran tidak mempunyai korelasi dengan kepatuhan membayar iuran [11]. Saat ini telah tersedia beragam kanal pembayaran, termasuk layanan non-tunai melalui *smartphone* dan akses transportasi seperti ojek motor bagi peserta yang tinggal di wilayah cukup jauh dari lokasi pembayaran. Namun, penelitian lain menemukan bahwa akses pembayaran memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN [21]. Jarak yang jauh ke lokasi pembayaran iuran dapat menjadi kendala bagi peserta, karena membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk transportasi.

Hubungan Persepsi Terhadap Risiko

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara persepsi terhadap risiko dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p\text{-value}=0,017$). Sejalan dengan temuan ini bahwa

persepsi risiko mempunyai korelasi dengan kepatuhan membayar iuran. Persepsi seseorang sangat ditentukan oleh informasi awal atau pengalaman pertama yang diterima, dalam hal ini kepatuhan membayar iuran JKN, karena dapat menjadi dasar dalam membentuk penilaian, sikap, dan mempengaruhi bagaimana seseorang memproses informasi berikutnya [12]. Namun, penelitian lain menemukan bahwa persepsi risiko akan kesehatan tidak berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN, karena persepsi positif tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata dalam membayar iuran rutin. Meskipun peserta memiliki persepsi yang baik, namun karena masalah ketidakstabilan ekonomi maka dapat menghambat kepatuhan dalam membayar iuran [14].

Hubungan Persepsi Manfaat BPJS Kesehatan

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara persepsi manfaat BPJS Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,027$). Selaras dengan temuan ini bahwa persepsi manfaat BPJS Kesehatan memiliki hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN [13]. Namun, penelitian lain mengungkapkan tidak terdapat korelasi antara persepsi manfaat BPJS kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN [14]. Persepsi manfaat BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh keselarasan antara ekspektasi peserta dan realitas pelayanan yang didapat. Persepsi manfaat bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman individu serta informasi yang diterima.

Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara riwayat penyakit katastropik dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,043$). Sejalan dengan penelitian ini bahwa riwayat penyakit katastropik berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran. Individu dengan riwayat penyakit cenderung lebih patuh membayar iuran karena berupaya menghindari pengeluaran biaya pengobatan [12]. Penelitian di Ethiopia menunjukkan bahwa keberadaan penyakit, baik

pada diri sendiri maupun anggota keluarga dapat mendorong partisipasi dalam asuransi kesehatan, termasuk kepatuhan membayar iuran [22].

Hubungan Pengetahuan terhadap JKN

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara pengetahuan terhadap JKN dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,035$). Semakin tinggi pengetahuan peserta tentang urgensi dan manfaat jaminan kesehatan, semakin kuat pula landasan dalam membangun sikap dan tindakan yang bertanggung jawab, termasuk kepatuhan dalam membayar iuran [11]. Namun, penelitian lain menemukan bahwa meskipun peserta memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya JKN, tetapi tidak dapat mendorong perilaku kepatuhan, karena tidak didukung oleh faktor krusial lain seperti kemampuan ekonomi yang memadai [23].

Hubungan Pengetahuan terhadap Kepatuhan dan Denda Pelayanan

Hasil studi diperoleh ada hubungan antara pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,000$). Selaras dengan temuan ini bahwa adanya korelasi antara pengetahuan dengan kepatuhan membayar premi [14]. Namun, penelitian lain menemukan bahwa pengetahuan peserta yang baik tentang JKN tidak selalu menjamin kepatuhan membayar iuran. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya faktor psikologis seperti sikap menunda dan pengalaman negatif yang dapat melemahkan dorongan untuk patuh membayar iuran [24].

Hubungan Pengetahuan terhadap Defisit BPJS Kesehatan

Hasil studi diperoleh tidak ada hubungan antara pengetahuan terhadap defisit BPJS Kesehatan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta PBPU ($p=0,962$). Searah dengan temuan ini bahwa pengetahuan terhadap defisit BPJS Kesehatan tidak mempunyai korelasi dengan kepatuhan membayar iuran JKN [25]. Defisit

anggaran JKN terjadi saat pengeluaran layanan kesehatan melebihi pendapatan yang diperoleh dari iuran peserta. Hal ini berisiko mengancam kelangsungan program JKN serta kualitas dan akses layanan BPJS Kesehatan. Dalam arti, keberlangsungan program ini bergantung pada kepatuhan semua peserta untuk membayar iuran secara rutin [26].

Variabel yang Paling Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran JKN

Hasil penelitian diperoleh variabel pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN adalah faktor yang paling berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN. Sejalan dengan temuan ini bahwa pengetahuan mempunyai korelasi dengan kepatuhan membayar iuran JKN pada multivariat. Pengetahuan berkaitan erat dengan frekuensi seseorang menerima informasi. Penyebaran informasi ini dapat melalui media cetak/massa, atau mengoptimalkan peran kader JKN di setiap daerah untuk sosialisasi [27].

SIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh, variabel yang mempunyai hubungan dengan kepatuhan membayar iuran JKN peserta BPJU ialah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan keluarga per anggota, jumlah anggota keluarga yang ditanggung dalam BPJS Kesehatan, metode pembayaran, persepsi terhadap risiko, persepsi manfaat BPJS Kesehatan, riwayat penyakit katastropik, pengetahuan terhadap JKN, serta pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN. Variabel yang paling berhubungan adalah variabel pengetahuan terhadap kepatuhan pembayaran iuran dan denda pelayanan program JKN. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menyusun strategi berupa peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai manfaat program JKN, serta penguatan peran kader JKN atau tokoh masyarakat sebagai pengingat iuran, dan memberikan perhatian lebih terhadap wilayah dengan tingkat kepatuhan

rendah, seperti melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan per triwulan dengan mengirimkan surat resmi kepada peserta yang menunggak sebagai bentuk pengingat sekaligus edukasi mengenai pentingnya menjaga status kepesertaan aktif, dan memuat informasi praktis mengenai cara pembayaran dan konsekuensi apabila iuran tidak dibayarkan secara rutin. Hal ini bertujuan agar tingkat kepatuhan peserta meningkat secara merata, defisit program dapat diminimalisir, dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat tetap terjamin. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan kualitatif agar dapat menggali lebih dalam faktor-faktor psikologis, sosial, budaya yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran JKN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT. Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua atas dukungan dan doa yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji atas segala arahan dan dukungan yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Populasi Kunci. Jakarta, Indonesia: Indonesia AIDS Coalition; 2016. p. 1–38.
- [2] Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev) JKN BPJS Kesehatan Laporan Monthly Report Monitoring JKN. Jakarta, Indonesia; 2024.
- [3] BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Data Sekunder BPJS Kesehatan dengan Nomor Surat 944/VI-01/0325. Semarang, Indonesia; 2025.
- [4] BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. Data Sekunder BPJS Kesehatan dengan Nomor Surat 2152/VI-01/0824. Semarang, Indonesia; 2024a.
- [5] BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang. *Data Sekunder BPJS Kesehatan dengan*

- Nomor Surat 2451/VI-01/0924. Semarang, Indonesia; 2024b.
- [6] Suspamira W. Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan membayar iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jambi tahun 2023. Jambi: Universitas Jambi; 2023.
- [7] Presiden RI. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*. 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/per-pres-no-82-tahun-2018>
- [8] Naha SK, Sirait RW, Kenjam Y. Factors related to compliance in paying contribution among National Health Insurance mandiri members in Oesapa Village, Kupang City. *Media Kesehatan Masyarakat*. 2022;4(3):378–86. <https://doi.org/10.35508/mkmhttps://ejurnal.undana.ac.id/MKM>
- [9] Novita M, Handayani S, Darma IY, Edison. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan mandiri pada pasien rawat jalan di Puskesmas Lubuk Basung Kab. Agam. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*. 2022;13(1):204–17.
- [10] Istamayu AA, Solida A, Wardiah R. Determinan kemauan membayar (willingness to pay) iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri di Kota Jambi tahun 2021. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*. 2022;4(2):10–21. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.546>
- [11] Wulandari A, Syah NA, Ernawati T. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*. 2020;9(1):7–17. <http://dx.doi.org/10.25077/jka.v9i1.1219>
- [12] Utami NJ, Karyus A, Pramudho K, Noviansyah. Kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)*. 2024;8(1):10–20.
- [13] Rosdiana H, Nurmawaty D, Heryana A, Irfandi A. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan oleh peserta mandiri pada unit rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres tahun 2023. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*. 2023;2(3):1–6.
- [14] Nurjannah S, Batara AS, Haeruddin. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan mandiri di Kelurahan Bontomanai Kabupaten Gowa. *Window of Public Health Journal*. 2021;2(5):765–73.
- [15] Mokolomban C, Mandagi CKF, Korompis GEC. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. *Jurnal Kesmas*. 2018;7(4):1–10.
- [16] Sudarman, Batara AS, Haeruddin. Faktor yang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan membayar iuran BPJS peserta mandiri di Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat. *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 2021;11(1):45–57. <https://doi.org/10.56338/pjkm.v11i1.1517>
- [17] Wahyuni NWA, Widodo S. Pelayanan kesehatan, pemilihan kelas perawatan dan sanksi layanan dengan kemauan membayar premi (willingness to pay) peserta mandiri (PBPU). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*. 2021;2(2):163–71.
- [18] Syakhila I, Nurgahayu, Sulaeman U. Faktor yang berhubungan dengan ATP dan WTP dengan penentuan keputusan kelas iuran BPJS Kesehatan. *Window of Public Health Journal*. 2021;1(5):427–36.
- [19] Ruhayat E, Suryani L. Indikasi malasnya peserta BPJS dalam membayar iuran wajib BPJS akibat metode pembayaran dan pelayanan yang tidak maksimal di lingkungan BPJS BSD. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*. 2018;1(1):1–9.
- [20] Murpratiwi O, Beniando NT, Sujoko. Analisis kemudahan melakukan pembayaran, ability to pay dan kepatuhan pembayaran iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional: studi pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Kantor Cabang Magelang tahun 2020. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. 2022;1(4):230–57. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i4.161>
- [21] Imron IA, Sutaip, Abdurochman. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri. *Journal of Midwifery and Health Administration Research*. 2023;3(2):141–8.
- [22] Entele BR, Emodi NV. Health insurance technology in Ethiopia: willingness to pay and

- its implication for health care financing. *American Journal of Public Health Research*. 2016;4(3):98–106.
- [23] Witati, Putri PI. Determinant of willingness to pay health insurance contribution to informal workers. *Economics Development Analysis Journal*. 2020;9(2):144–58. <https://doi.org/10.15294/edaj.v9i2.38440>
- [24] Endartiwi SS. Pengaruh faktor pengetahuan terhadap kemauan untuk membayar iuran JKN di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan*. 2022;11(2):91–100.
- [25] Kalalo EG, Tucunan AA, Rumayar A. Hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri yang membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kelurahan Paniki Bawah. *Jurnal Kesehatan Tambusai*. 2023;4(3):3878–86.
- [26] Djamhari EA, Aidha CN, Ramdlaningrum H, Kurniawan DW, Fanggidae SJ, Herawati, et al. Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): mengapa dan bagaimana mengatasinya. Jakarta, Indonesia: Perkumpulan PRAKARSA; 2020. p. 1–104.
- [27] Dewiyani AC, Fadila R. Faktor determinan kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta mandiri di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*. 2022;8(1):1–10.